

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia secara umum menginginkan adanya ekonomi makro yang mantap, tetapi dalam ekonomi makro terdapat masalah jangka pendek yaitu masalah stabilisasi, dan masalah jangka panjang yaitu masalah pertumbuhan. Keadaan ekonomi yang stabil harus di ikuti oleh kestabilan pendapatan, kesempatan kerja dan tingkat harga barang-barang. Sebagaimana di kemukakan oleh (Ampindo, 2003) bahwa : “

Perekonomian yang stabil tidak dalam arti perekonomian yang selalu mengalami booming secara terus menerus (tidak terjadi penurunan dan kenaikan), melainkan suatu kondisi yang fluktuatif pada variabel ekonomi, terutama harga-harga komoditi secara umum dan tingkat pendapatan, bergerak berubah dalam kondisi yang wajar.”

Pada tahun 1975 Indonesia telah mulai mempunyai konsep otonomi daerah dan konsep desentralisasi fiskal sebagai salah satu usaha untuk mencapai perekonomian yang mantap, hal ini tercantum dalam UU RI No. 5 tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, tetapi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada zaman orde baru dahulu, tidak dapat diwujudkan secara optimal, buktinya konsep yang di terapkan yaitu sistem sentralisasi.

Sentralisasi yang dilakukan pada zaman orde baru menimbulkan berbagai permasalahan pembangunan di daerah, salah satunya proses pembangunan daerah

secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan ketimpangan wilayah semakin besar.(Tn.2005:1) Keadaan ini karena sistem pembangunan yang terpusat cenderung mengambil kebijakan yang seragam dan mengakibatkan perbedaan kegunaan daerah yang sangat besar, oleh karena itu banyak kekayaan daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sementara itu daerah yang sumber dayanya sesuai dengan kebijakan nasional akan dapat semakin tumbuh cepat. Sistem pembangunan yang sangat terpusat menimbulkan ketidakadilan yang sangat besar dalam alokasi sumber daya nasional, terutama dana pembangunan. Keadaan tersebut dilihat banyaknya wilayah yang kaya sumber daya alam, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih sangat rendah serta tertinggal di dibandingkan dengan daerah lain.

Penerapan otonomi daerah yang sebenarnya di laksanakan sejak tahun 2001 dengan ditandai oleh UU No.33 tahun 2000 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan berkembangnya pengelolaan suatu daerah melalui otonomi daerah selayaknya pembangunan di suatu daerah tersebut berkembang secara pesat karena pemerintah daerah dengan bebas untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari daerah maupun dari pusat sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa ada campur tangan yang berlebihan dari pemerintah pusat.

Desentralisasi tidaklah mudah untuk di definisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal,

politik, perubahan administratif dan sistem pemerintahan ,pembangunan sosial serta ekonomi. Osoro pun menyebutkan dalam **Khusaini (2006),** secara umum konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal dan desentralisasi ekonomi’.

Adanya pelaksanaan otonomi daerah ini tidak akan lepas dari kesiapan masing-masing daerah dalam permasalahan pendanaan, maupun sumberdaya manusianya. Dengan adanya otonomi daerah, di mana daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak dan retribusi daerah, serta memikirkan untuk mendapatkan hasil pajak dan retribusi daerah lebih banyak kepada pemerintah daerah dibanding dengan sebelum adanya otonomi daerah. Hal ini akan sangat dirasakan oleh daerah-daerah yang miskin sumber daya alam karena sumber dana mereka hanya akan berasal dari pendapatan asli daerah, di samping sumber dana dari subsidi atau bantuan pemerintah pusat.

Desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia lebih dirasakan sebagai motivasi untuk mendapatkan kekuasaan yang besar dalam mengelola pendapatan dari sumber daya alam, serta kewenangan pengambilan keputusan politik dan hukum, serta pemerintahan, padahal seharusnya motivasi dasar berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal terdapat kegiatan yang membedakannya dengan sistem sentralisasi pada periode dahulu yaitu dengan di terapkannya aturan keuangan pusat dan daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal

pada satu sisi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, di sisi lain untuk memfasilitasi proses otonomi daerah, tetapi hampir semua daerah persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Pada umumnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) suatu daerah didominasi oleh transfer pemerintah pusat dan transfer lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan sumber daya yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD dari suatu daerah bukanlah disebabkan karena daerah tersebut memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang menjanjikan, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat, yaitu dengan selama ini sumber keuangan potensial dikuasai oleh pemerintah pusat.

Keberhasilan pencapaian dilaksanakannya salah satu tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro daerah, diantaranya yaitu kondisi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah. Banyaknya sumber daya alam yang ada dapat menjadi modal pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut. Pada penelitian ini kondisi pertumbuhan ekonomi yang dilihat adalah di Provinsi Jawa Barat.

Data berikut ini adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu dari tahun 1989 sampai tahun 2007.

Tabel 1.1

**Laju Pertumbuhan Ekonomi (Juta Rp.) Sebelum dan Sesudah
Diberlakukannya Desentralisasi Fiskal di Provinsi Jawa Barat**

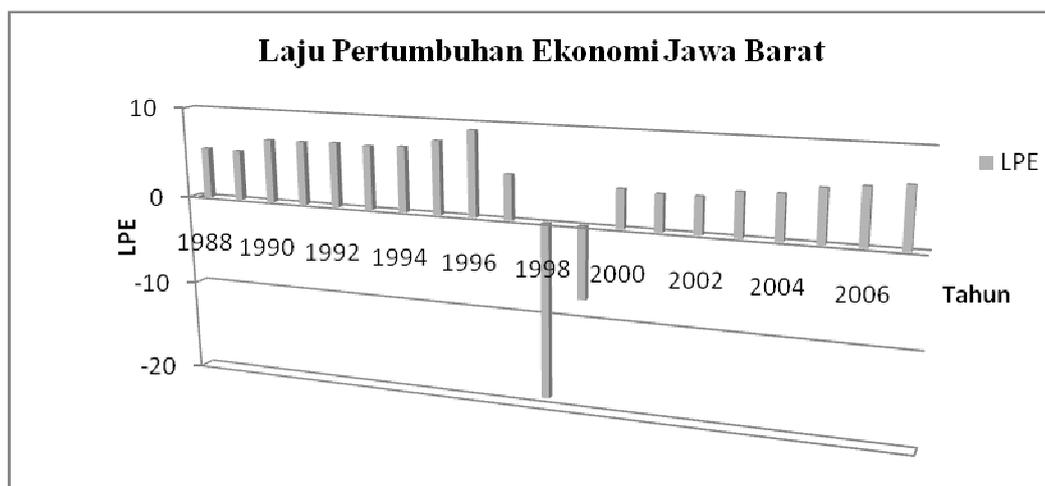
Sebelum		Sesudah	
Tahun	LPE	Tahun	LPE
1988	5.5	2001	3.89
1989	5.45	2002	3.94
1990	6.88	2003	4.67
1991	6.89	2004	4.77
1992	7.01	2005	5.6
1993	6.89	2006*	6.02
1994	7.04	2007*	6.41
1995	7.9		
1996	9.21		
1997	4.87		
1998	-19.02		
1999	-7.79		
2000	4.15		

*Sumber : BPS , data diolah *)angka sementara*

Pada tabel 1.1 Tampak jelas dimana laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat sebelum era desentralisasi fiskal sempat mencapai angka 9,21 pada tahun 1996, tetapi pertumbuhannya tidak stabil karena adanya krisis yang melanda dunia maka pertumbuhannya di Provinsi Jawa Barat pun mengalami penurunan pada tahun 1998 mencapai -19.02. Hal ini mengakibatkan rendahnya stabilitas laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Secara umum terlihat pada grafik yang adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu penurunan yang drastis pada tahun 1998-1999 dan mulai kembali pertumbuhan ekonomi di tahun 2000 walaupun kondisi pertumbuhannya sangat rendah.

Sedangkan pada era selama di berlakukannya desentralisasi fiskal sampai sekarang, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dapat tumbuh dan tidak ada penurunan yang drastis, laju pertumbuhannya pun dapat menembus angka 6,41 pada tahun 2007.



Sumber : BPS, data diolah

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Desentralisasi Fiskal di Provinsi Jawa Barat

Dalam grafik 1.1 memperlihatkan kondisi pada tahun 1989 sampai tahun 2007, yang memperlihatkan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah adanya desentralisasi fiskal mengalami fluktuasi, dan jika kondisi seperti ini tidak berubah akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dan akan berdampak pula pada pertumbuhan nasional.

Dapat terlihat bahwa meskipun pelaksanaan desentralisasi fiskal telah berlangsung dari tahun 2001, dan seharusnya berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dalam angka laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat hanya mengalami kenaikan yang rendah dari tahun 2001 sampai 2007. Dimana

laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat adanya pertumbuhan dari tahun 2001 sampai tahun 2007, tetapi masih saja laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi pun rendah, dan lebih besar pertumbuhan pada tahun-tahun di era sebelum desentralisasi fiskal dari pada era tahun setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal.

Tabel 1.2

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat
Sebelum Desentralisasi Fiskal**

No.	Kabupaten/kota	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Kab. Bogor	10.62	2.33	8.56	9.08	7.97	6.5	9.93	8.63	11.7	4.77	-18	1.6	1.59
2	Kab. Sukabumi	15.9	-3.89	3.56	4.51	7.22	7.82	7.15	7.21	8.67	3.2	-10.8	1.65	12.49
3	Kab. Cianjur	6.03	1.7	4.75	6.74	6.16	7.87	5.53	6.8	6.99	3.67	-6.55	2.14	3.23
4	Kab. Bandung	5.34	6.47	8.36	4.53	5.42	9.41	8.83	9.28	10.53	4.93	-19.6	2.99	5.23
5	Kab. Garut	8.22	10.82	6.52	4.53	8.22	7.25	7.26	7.51	6.82	3.03	-11.6	2.52	3.89
6	Kab. Tasikmalaya	3.62	8.74	3.24	5.67	6.9	5.74	6.06	7.31	7.64	3.62	-13.1	9.35	3.47
7	Kab. Ciamis	6.16	0.12	6.33	3.12	5.02	6.99	5.43	7.71	6.79	3.69	-9.45	2.39	3.32
8	Kab. Kuningan	2.37	5.25	-0.7	5.63	5.88	5.55	5.89	6.49	7.01	3.46	-5.66	-23.5	36.02
9	Kab. Cirebon	1.4	4.68	4.72	6.93	8.63	7.09	7.24	8.05	7.4	3.37	-20.8	3.81	4.38
10	Kab. Majalengka	5.15	4.51	4.7	10.31	6.92	8.21	12.9	7.76	11.29	5.11	-9.16	3.54	4.08
11	Kab. Sumedang	8.64	7.1	4.13	4.87	5.24	5.47	6.33	6.95	7.52	2.88	-11.8	2.22	0.4
12	Kab. Indramayu	-2.42	2.75	8.08	2.88	4.46	0.65	-3.79	-0.25	31.35	-6.65	-5.39	-10.7	0.4
13	Kab. Subang	5.99	11.24	0.45	4.09	3.03	4.03	5.46	6.84	7.39	3.28	0.18	0.29	3.71
14	Kab. Purwakarta	5.74	4.6	3.07	9.27	5.89	7.93	12.6	7.53	7.7	2.09	-11.7	115	2.59
15	Kab. Karawang	4.15	3.44	2.23	6.67	6.68	9.51	9.21	8.06	9.11	4.52	-19.8	7.78	10.51
16	Kab. Bekasi	8.33	5.65	9.53	7.17	15.6	16.05	15.5	14.4	5.07	6.93	-21.4	2.34	5.58
17	Kota Bogor	6.22	6.55	3.07	8.29	7.1	7.2	6.86	10.06	11.2	5.09	-16.7	19.6	4.6
18	Kota Sukabumi	15.9	-3.89	3.56	5.2	6.65	6.71	7.64	7.8	7.27	3.86	-17.2	3.2	4.28
19	Kota Bandung	7.24	10.52	9.05	10.77	11.18	12.52	10.1	12.32	9.31	4.47	-19.7	2.8	5.14
20	Kota Cirebon	7.67	8.53	3.26	6.44	6.8	8.02	7.34	8.32	51.92	6.64	-5.28	2.29	3.56

Sumber : BPS, data diolah

Pada tabel 1.2 merupakan kondisi laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini merupakan cerminan dari gambaran umum Jawa Barat yang di sebabkan oleh kondisi daerah

tingkat I mengalami fluktuasi sehingga berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi keseluruhan di Provinsi Jawa Barat.

Pada dasarnya suatu keberhasilan desentralisasi fiskal terlihat dari kondisi daerah yang semakin baik dengan di tandai dengan adanya laju pertumbuhan daerah khususnya tingkat I yang stabil dan tinggi, tetapi pada kenyataannya masih saja laju pertumbuhan daerah kurang optimal hal ini dapat terlihat pada grafik di atas.

Tabel 1.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi (Juta Rp.) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat setelah Desentralisasi Fiskal

NO.	Kabupaten/kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Bogor	3.94	4.42	4.84	5.58	5.85	5.95	6.04
2	Kab. Sukabumi	10.22	7.97	3.74	3.96	4.35	3.92	4.19
3	Kab. Cianjur	3.69	3.74	3.68	3.97	3.82	3.34	4.22
4	Kab. Bandung	4.78	4.78	4.99	5.61	5.55	5.62	5.92
5	Kab. Garut	3.62	3.96	2.7	4.01	4.16	4.11	4.76
6	Kab. Tasikmalaya	3.14	3.53	3.44	3.52	3.83	4.01	4.33
7	Kab. Ciamis	2.93	4.18	4.08	4.36	4.58	3.84	5.01
8	Kab. Kuningan	4.3	3.58	3.54	4.04	4.08	4.13	4.22
9	Kab. Cirebon	4.88	4.12	4.04	4.67	5.06	5.14	5.37
10	Kab. Majalengka	4.89	3.31	3.24	4.08	4.46	4.18	4.87
11	Kab. Sumedang	3.44	3.98	3.86	4.31	4.52	4.17	4.64
12	Kab. Indramayu	-9	0.54	31.4	4.65	-7.82	2.42	2.62
13	Kab. Subang	1.67	12.79	7	7.17	6.97	3.75	5.09
14	Kab. Purwakarta	3.5	4	3.01	3.72	3.51	3.87	3.9
15	Kab. Karawang	15.48	2.46	4.58	10.78	7.87	7.52	7.11
16	Kab. Bekasi	4.75	5.22	4.75	6.11	6.01	5.99	6.14
17	Kota Bogor	5.68	5.79	6.07	6.1	6.12	6.03	6.09
18	Kota Sukabumi	5.08	5.34	5.39	5.77	5.95	6.23	6.51
19	Kota Bandung	7.54	7.13	7.34	7.49	7.53	7.83	8.24
20	Kota Cirebon	3.57	4.17	4.29	4.66	4.89	5.54	6.17

Sumber : BPS, data diolah

Pada tabel yang ada di atas laju pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat setelah terlaksananya desentralisasi fiskal mengalami kenaikan, tetapi lagi –lagi hanya mengalami kenaikan yang rendah. Jika kita cermati bahwa ada pula perbedaan yang terlihat antara perkembangan laju perekonomian antara daerah kabupaten dan daerah kota yang jika di biarkan akan menghambat pula pada kondisi regional di Provinsi Jawa Barat.

Pada daerah yang yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah merupakan keuntungan yang besar karena akan menyumbangkan kontribusinya pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk masing-masing daerahnya. Setiap daerah pun memiliki keunggulan sumber daya alam yang berbeda-beda untuk meningkatkan PDRB. Dalam penelitian ini penulis hanya melihatnya dari sumber daya alam pertanian dan pertambangan saja. Berikut adalah informasi tentang besarnya sumber daya alam pertanian dan pertambangan di kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Barat setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal.

Tabel 1.4

Kontribusi Sumber Daya Alam (Pertanian dan Pertambangan) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rp) Menurut Kabupaten dan Kota Setelah Diberlakukannya Desentralisasi Fiskal di Provinsi Jawa Barat.

No	Kabupaten dan Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Bogor	319,354.67	314,219.48	340,063.42	314,553.30	282,74.39	307,414.98	312,423.76
2	Kab. Sukabumi	445,188.09	469,879.35	372,655.96	342,624.79	362,693.75	365,039.13	378,452.02
3	Kab. Cianjur	6,893.90	7,197.20	7,525.05	7,879.30	8,262.63	8,678.05	9,129.16
4	Kab. Bandung	195,647.68	217,115.22	234,475.15	216,746.78	224,656.93	234,570.64	245,205.26
5	Kab. Garut	10,510.53	10,557.19	10,606.52	10,665.92	10,842.97	11,479.99	12,644.15
6	Kab. Tasikmalaya	6,307.79	6,332.12	7,002.64	10,725.52	10,788.56	11,253.29	11,826.03
7	Kab. Ciamis	18,732.54	19,348.84	20,186.64	20,911.35	21,815.20	22,699.03	23,434.81
8	Kab. Kuningan	24,688.78	25,003.99	25,034.77	25,112.47	25,137.58	25,579.80	26,032.73
9	Kab. Cirebon	21,551.08	22,510.10	23,766.02	24,921.98	26,236.75	27,882.58	30,157.80
10	Kab. Majalengka	115,462.92	129,961.37	142,839.35	141,788.32	146,408.36	150,590.75	159,586.22
11	Kab. Sumedang	3,594.14	3,882.16	4,272.92	4,632.79	5,059.51	5,572.44	5,925.79
12	Kab. Indramayu	13,499,397.37	13,188,253.18	8,163,923.32	5,177,20.11	4,207,725.19	4,182,823.23	4,251,005.51
13	Kab. Subang	893,822.23	1,353,571.88	488,513.42	623,780.35	754,057.21	714,489.38	749,955.13
14	Kab. Purwakarta	8,765.40	9,091.40	8,903.96	9,202.51	9,603.73	10,034.68	10,067.79
15	Kab. Karawang	1,086,075.10	880,312.06	613,876.00	656,627.65	765,288.00	818,156.00	780,931.53
16	Kab. Bekasi	300,607.33	497,863.01	502,348.78	482,680.71	574,372.90	596,695.49	580,274.39
17	Kota Bogor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Kota Sukabumi	132.47	120.53	120.63	122.83	125.49	122.31	114.36
19	Kota Bandung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Kota Cirebon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : BPS, data diolah

Keadaan sumber daya alam yang dapat terlihat pada tabel 1.4 mencerminkan bervariasinya kondisi daerah dalam kontribusinya terhadap PDRB, kita lihat sumber daya alam yang menyumbangkan pada PDRB terbesar adalah Kabupaten Indramayu dan banyak daerah yang bahkan tidak menyumbangkan sumber daya alam terhadap PDRB yaitu kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cirebon dan Kota

Bekasi , hal ini dapat terjadi karena daerah tersebut tidak memiliki sumber daya alam dari sumber pertanian dan pertambangan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kab. Bandung selama tahun 2008 lalu. LPE Kab. Bandung hanya tumbuh di sektor primer, yakni pertanian, pertambangan, dan penggalian. Sedangkan kelompok sekunder dan tersier mengalami perlambatan. Sektor primer pada tahun 2006 hanya tumbuh 0,8 %, namun tahun 2007" (Kasi Pemberitaan Bagian Humas Pemkab Bandung Asep Sahdiana, dalam rilisnya, Harian Pikiran Rakyat). Kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan tahun 2007 Rp 1,37 triliun. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian untuk PDRB juga naik dari Rp 245,2 miliar tahun 2007 menjadi Rp 255,8 miliar pada tahun 2008,".

Desentralisasi yang telah dilaksanakan seyoganya akan berdampak pada perkembangan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada kenyataannya dapat terlihat di tabel 1.4 bahwa laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat memang mengalami pertumbuhan tetapi hanya rendah saja. Dan jika kondisi ini tidak segera di atasi akan berdampak negatif banyak maupun sedikit pada pertumbuhan negara pada umumnya.

Keberhasilan pencapaian tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro daerah. Jika pelaksanaan otonomi daerah tidak dijalankan dengan baik dan tidak efisien maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu hal ini perlu di teliti lebih lanjut. Penelitian juga ingin menganalisis kontribusi

desentralisasi fiskal di Jawa Barat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalam periode 1989 sampai dengan 2007 . Mengingat era baru desentralisasi fiskal paska reformasi digulirkan sejak tahun 2001, maka riset ini akan pula mengevaluasi perbedaan antara kontribusi desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah antara sebelum dan sesudah tahun 2001.

Maka penulis mengajukan judul penelitian sebagai berikut: **“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 1989–2007.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan yang menarik untuk diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Sumber Daya Alam terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Jawa Barat selama tahun 1989-2007?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Jawa Barat selama tahun 1989-2007?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Jawa Barat selama tahun 1989-2007?
4. Bagaimana Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Jawa Barat sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan Desentralisasi Fiskal Periode tahun 1989-2007?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

- 1 Untuk mengetahui Pengaruh Sumber Daya Alam terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Jawa Barat selama tahun 1989-2007?
- 2 Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Jawa Barat selama tahun 1989-2007?
- 3 Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Jawa Barat selama tahun 1989-2007?
- 4 Untuk mengetahui Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Jawa Barat sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan Desentralisasi Fiskal?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai informasi tambahan bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk mengetahui seberapa besar dampak sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal di Kabupaten dan Kota Jawa Barat.

2. Memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya masalah Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota Jawa Barat.
3. Memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian tindak lanjut mengenai pertumbuhan ekonomi

